

658.4012

BAS

S

Strategi Manajemen Sektor Publik



		PERPUSTAKAAN	
No. INV.	A-MSI-17		
Ta. Angg.	2016	Cat :	C1
PARAF.	h	TGL.	15 Agst 2017

Indra Bastian



**Penerbit
Salemba Empat**

DAFTAR ISI

Tentang Penulis	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	xi
Daftar Tampilan	xxv

Bab I Definisi dan Ruang Lingkup Strategi Manajemen Sektor Publik I

Realitas	3
Organisasi Sektor Publik	4
Pengertian Organisasi Sektor Publik	4
Karakteristik Organisasi Sektor Publik	6
Value for Money	8
Konteks Strategi Manajemen Sektor Publik	8
Definisi Strategi Manajemen Sektor Publik	8
Peranan Strategi Manajemen Sektor Publik	10
Kerangka Strategi Manajemen Sektor Publik	11
Proses Strategi Manajemen Sektor Publik	12
Tahapan 1. Pengembangan Strategi Manajemen Sektor Publik	12
Tahapan 2. Perencanaan Strategi Manajemen Sektor Publik	14
Tahapan 3. Penyelarasan Organisasi	14
Tahapan 4. Perencanaan Operasional	14
Tahapan 5. Pengamatan dan Pembelajaran	15
Tahapan 6. Pengujian dan Adaptasi	15
Komponen Model Strategi Manajemen Sektor Publik	16
Misi Kelembagaan (Institutional Mission)	16
Profil Kelembagaan (Institutional Profile)	16

Lingkungan Eksternal (External Environment)	17
Analisis dan Pilihan Strategis (Strategic Analysis and Choice)	17
Tujuan Jangka Panjang (Long Term Objectives)	17
Strategi Besar (Grand Strategy)	18
Tujuan Tahunan (Annual Objectives)	18
Strategi Fungsional (Functional Strategies)	18
Kebijakan Publik dan Lembaga (Public and Institutional Policies)	19
Pelembagaan Strategi (Institutionalizing The Strategy)	19
Pengendalian dan Evaluasi Publik (Public Control and Evaluation)	19
Ruang Lingkup Strategi Manajemen Sektor Publik: Peranan Strategi Manajemen dalam Pencapaian Tujuan Organisasi Sektor Publik	20
Soal Esai	20
Soal Pilihan Ganda	21
Studi Kasus	23

Bab 2 Regulasi Strategi Manajemen Sektor Publik 27

Realitas	29
Konsep Regulasi Strategi Manajemen Sektor Publik	30
Pengertian Regulasi Publik	30
Pengertian Regulasi Strategi Manajemen Sektor Publik	30
Kategori Regulasi Strategi Manajemen Sektor Publik	31
Regulasi Ekonomi	31
Regulasi Sosial	32
Regulasi Administrasi	33
Implikasi Kerangka Regulasi Strategi Manajemen Sektor Publik	35
Regulasi Inflasi	35
Biaya Regulasi	35
Perhitungan Biaya Regulasi	36
Biaya Administratif	37
Biaya Kepatuhan Substantif	38
Biaya Regulasi (Regulatory Charges)	39
Biaya Tidak Langsung dan Dampak Ekonomi	39
Biaya Tangguhan	39
Penilaian Kualitas Regulasi	40
Teknik Penyusunan Regulasi Strategi Manajemen Sektor Publik	42
Perumusan Masalah	42
Penyusunan Rancangan Regulasi Strategi Manajemen Sektor Publik	45
Pembahasan Regulasi	45
Pengesahan Regulasi	46

Titik Kritis dalam Regulasi Strategi Manajemen Sektor Publik	46
Perumusan Masalah	46
Penyusunan Rancangan Regulasi Strategi Manajemen Sektor Publik	47
Pembahasan Regulasi	47
Pengesahan Regulasi	47
Soal Esai	48
Soal Pilihan Ganda	48
Studi Kasus	50

Bab 3 Kerangka Konseptual Sistem Kesejahteraan 53

Realitas	55
Ideologi Kesejahteraan	56
Marxisme	57
Pengertian Marxisme	57
Ciri-Ciri Marxisme	57
Negara Penganut Ideologi Marxisme	58
Kesejahteraan menurut Marxisme	58
Sosialisme	58
Pengertian Sosialisme	58
Ciri-Ciri Sosialisme	59
Negara Penganut Ideologi Sosialisme	59
Kesejahteraan menurut Sosialisme	59
Demokrasi Sosial	60
Pengertian Demokrasi Sosial	60
Ciri-Ciri Demokrasi Sosial	60
Negara Penganut Ideologi Demokrasi Sosial	61
Kesejahteraan menurut Demokrasi Sosial	61
Konservatisme	62
Pengertian Konservatisme	62
Ciri-Ciri Konservatisme	62
Negara Penganut Ideologi Konservatisme	62
Kesejahteraan menurut Konservatisme	63
Individualisme Liberal	63
Pengertian Individualisme Liberal	63
Ciri-Ciri Individualisme Liberal	64
Negara Penganut Ideologi Individualisme Liberal	64
Kesejahteraan menurut Individualisme Liberal	65
Fasisme	65
Pengertian Fasisme	65

Ciri-Ciri Fasisme	65
Negara Penganut Ideologi Fasisme	67
Kesejahteraan menurut Fasisme	67
Perbandingan Implementasi Ideologi Kesejahteraan	67
Kesejahteraan dan Kesejahteraan Sosial	67
Ruang Lingkup Kesejahteraan Sosial	70
Tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	71
Sasaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial	72
Usaha Pembangunan Kesejahteraan Sosial	73
Alternatif Perspektif Kesejahteraan	78
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79
Metode Perhitungan IPM	85
Perhitungan Perkembangan IPM	88
Kebahagiaan Nasional Bruto	89
Soal Esai	92
Soal Pilihan Ganda	93
Studi Kasus	94

BAGIAN I NEGARA KESEJAHTERAAN

Bab 4 Negara Kesejahteraan 97

Realitas	99
Pengertian Negara Kesejahteraan	101
Motif Negara Kesejahteraan	102
Negara Kesejahteraan Dibentuk oleh Organisasi Sosial Produksi	102
Negara Kesejahteraan Ditentukan oleh Kepentingan Negara atau Pemerintah	103
Prinsip Kesejahteraan	104
Keseimbangan	104
Kebebasan	105
Kewarganegaraan	105
Tujuan Negara Kesejahteraan	105
Sistem Negara Kesejahteraan	106
Model Universal	106
Model Institusional	106
Model Residual	106
Model Minimal	107
Elemen Negara Kesejahteraan	107
Siklus Negara Kesejahteraan	109
Negara Kesejahteraan yang Muncul sebagai Bagian dari Logika Industrialisasi	109

Negara Kesejahteraan Berkembang sebagai Respons terhadap Kebutuhan Kapitalisme Lanjutan	109
Negara Kesejahteraan merupakan Produk Modernisasi Masyarakat	110
Negara Kesejahteraan Dibentuk oleh Perebutan Politik dan Kelas Sosial	111
Teknik Implementasi Negara Kesejahteraan	114
Model Universal	114
Karakteristik Model Universal	115
Model Institusional	116
Fitur Utama Penyediaan Layanan Kesejahteraan di Jerman	119
Model Residual	122
Model Minimal	123
Contoh Negara Kesejahteraan	124
Negara Kesejahteraan dengan Model Universal	124
Negara Kesejahteraan dengan Model Institusional	125
Asuransi Pensiun	125
Asuransi Medis	125
Asuransi Perawatan Jangka Panjang	125
Program Kebijakan Kesehatan Masyarakat	126
Program Kebijakan untuk Anak-Anak dan Keluarga	126
Sumber Pendapatan	126
Negara Kesejahteraan dengan Model Residual	127
Tunjangan bagi Orang Tua Lanjut Usia, Kaum Difabel, dan Para Yatim Piatu/Janda/Duda	127
Cakupan Tunjangan bagi Kontributor dan Nonkontributor	127
Sumber Dana	127
Kualifikasi	128
Tunjangan untuk Para Orang Tua Lanjut Usia	130
Tunjangan untuk Seseorang yang Memiliki Cacat Permanen	131
Tunjangan untuk Para Yatim Piatu/Janda/Duda	131
Lembaga Administratif	131
Tunjangan bagi Kesehatan dan Persalinan	132
Cakupan Tunjangan bagi Kontributor dan Nonkontributor	132
Sumber Dana	133
Kualifikasi	133
Tunjangan Kesehatan dan Persalinan (Sickness and Maternity Benefit)	134
Tunjangan Kesehatan bagi Para Tenaga Kerja	135
Lembaga Administratif	135
Tunjangan bagi Pengangguran	135
Cakupan	135

Sumber Dana	135
Kualifikasi	135
Lembaga Administratif	136
Negara Kesejahteraan dengan Model Minimal	136
Kesejahteraan Sosial di Korea Selatan	136
Soal Esai	137
Soal Pilihan Ganda	137
Studi Kasus	139

BAGIAN II IN KIND

Bab 5 Alokasi Anggaran Pemerintah pada Pelayanan Kesejahteraan	143
Realitas	145
Teori Anggaran Pemerintah pada Pelayanan Kesejahteraan	147
Pengertian Anggaran Pemerintah pada Pelayanan Kesejahteraan	147
Penentu Anggaran Pemerintah pada Pelayanan Kesejahteraan	147
Komponen Anggaran Pemerintah pada Pelayanan Kesejahteraan	148
Anggaran Pendapatan	149
Anggaran Modal	149
Anggaran Kesejahteraan	151
Makna dan Pentingnya Alokasi Anggaran Pemerintah pada Pelayanan Kesejahteraan	152
Fungsi Utama Alokasi Anggaran Pemerintah pada Pelayanan Kesejahteraan	154
Sistem Anggaran Pemerintah pada Pelayanan Kesejahteraan	155
Alokasi Anggaran Sektoral	155
Alokasi Anggaran per Kelompok/Gugus	155
Alokasi Anggaran per Unit Program	156
Siklus Anggaran Pemerintah pada Pelayanan Kesejahteraan	157
Penyusunan Alokasi Anggaran Pemerintah pada Pelayanan Kesejahteraan	158
Pelaksanaan Alokasi Anggaran Pemerintah pada Pelayanan Kesejahteraan	159
Pengawasan Alokasi Anggaran Pemerintah pada Pelayanan Kesejahteraan	161
Teknik Anggaran Pemerintah pada Pelayanan Kesejahteraan	162
Teknik Pengelolaan Pengeluaran Anggaran	162
Sistem Amplop (The Envelope System)	162
Anggaran Bola Salju (Snowball Budget)	162
Persentase Anggaran (Budget by Percentage)	164
Penganggaran Elektronik (Electronic Budgeting)	164
Teknik Perkiraan Keuangan pada Periode Tertentu	164
Teknik Peramalan (Forecasting Technique)	165
Teknik Arus Kas (Cashflow Technique)	167

Contoh Alokasi Anggaran Pemerintah pada Pelayanan Kesejahteraan	168
Swedia	168
Pendapatan–Perkiraan Pendapatan untuk Tahun Anggaran 2014	169
Pengeluaran–Pengajuan Pengeluaran Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2014	169
Jerman	171
Inggris	173
Korea Selatan	175
Soal Esai	176
Soal Pilihan Ganda	176
Studi Kasus	178

Bab 6 Kerangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Minimum 181

Realitas	183
Teori Kesejahteraan Minimum	185
Konsep Dasar Kesejahteraan Minimum	185
Pengukuran Kesejahteraan	186
Kemiskinan	186
Indikator Kemiskinan	187
Ketimpangan (Inequality)	189
Konsep Kebutuhan Dasar Minimum	189
Diagram Venn Basic Minimum Needs	190
Indikator Kesejahteraan Minimum	191
Pengertian Penyelenggaraan Kesejahteraan Minimum: Kewajiban Negara dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan	194
Bentuk Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	195
Tujuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	196
Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	198
Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	199
Sistem Penyelenggaraan Kesejahteraan Minimum	199
Pensiun dan Pekerjaan	199
Pangan	200
Pendidikan	201
Kesehatan	201
Keamanan Lingkungan	202
Kondisi Darurat	203
Siklus Penyelenggaraan Kesejahteraan Minimum	204
Merumuskan Visi Kesejahteraan Minimum	206
Merumuskan Tahapan Pencapaian Visi Kesejahteraan Minimum dalam Periode Jangka Menengah maupun Tahunan	206

Mengidentifikasi Kemajuan/Pencapaian Indikator Kesejahteraan Minimum sampai Saat Ini	207
Mengidentifikasi Permasalahan sebagai Dampak atas Belum Tercapainya Salah Satu atau Sebagian Target Indikator Kesejahteraan Minimum	207
Menemukan Akar Permasalahan	208
Melakukan Analisis Permasalahan Berbasis Aktivitas Kesejahteraan Minimum	209
Merumuskan Strategi yang Fokus pada Aktivitas Pelayanan Kesejahteraan Minimum dari Kondisi Saat Ini	209
Merumuskan Indikator Kesejahteraan Minimum yang Ditargetkan di Masa yang akan Datang	210
Menyusun Strategi untuk Mencapai Indikator Kesejahteraan Minimum yang telah Ditargetkan di Masa yang akan Datang termasuk Memenuhi Target Indikator yang Belum Dipenuhi pada Periode Ini.	210
Merumuskan Program dan Kegiatan dalam Menjalankan Strategi	210
Mendokumentasikan Indikator Kesejahteraan Minimum yang Ditargetkan di Masa yang akan Datang, Strategi Pencapaiannya, dan Tindakan untuk Menjalankan Strategi dalam Sebuah Dokumen Perencanaan yang Lengkap	211
Teknik Penyelenggaraan Kesejahteraan Minimum	211
Standar Prestasi	211
Indikator/Indeks Prestasi	213
Standar Pelayanan Minimal	214
Contoh Penyelenggaraan Kesejahteraan Minimum	217
Soal Esai	219
Soal Pilihan Ganda	219
Studi Kasus	221

BAGIAN III JAMINAN DENGAN KONTRIBUSI KAS

Bab 7 Partisipasi dalam Pengumpulan Dana Kesejahteraan 223

Realitas	225
Teori Partisipasi dalam Pengumpulan Dana Kesejahteraan	227
Definisi Partisipasi Kontribusi Kas Masyarakat	227
Pentingnya Partisipasi Kontribusi Kas Masyarakat	229
Bentuk Partisipasi Kontribusi Kas Masyarakat	230
Tipe Partisipasi Kontribusi Kas Masyarakat	231
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Kontribusi Kas Masyarakat	235
Keberhasilan Partisipasi Kontribusi Kas Masyarakat	237
Sistem Partisipasi dalam Pengumpulan Dana Kesejahteraan	238
Pengumpulan Dana Perorangan	238
Pengumpulan Dana melalui Lembaga	239
Pengumpulan Dana Setahun Sekali	240

Perbandingan	240
Sifat Partisipasi dalam Pengumpulan Dana Kesejahteraan	241
Sifat Pengumpulan Dana Perorangan	241
Sifat Pengumpulan Dana melalui Lembaga	242
Sifat Pengumpulan Dana Setahun Sekali	243
Skema Pensiun Sekaligus	243
Santunan Pembayaran Pensiun Berkala	244
Teknik Partisipasi dalam Pengumpulan Dana Kesejahteraan	244
Teknik Pengumpulan Dana melalui Pembayaran Langsung ke Bagian Pelayanan	244
Teknik Pengumpulan Dana melalui Asuransi	245
Bagaimana Cara Perusahaan Asuransi Menghitung Premi Asuransi?	246
Bagaimana Harga yang Dihitung?	247
Teknik Pengumpulan Dana melalui Program Pemerintah	251
Contoh Partisipasi dalam Pengumpulan Dana Kesejahteraan	251
Swedia	251
Kesehatan (Healthcare)	252
Perawatan Gigi (Dental Care)	252
Tunjangan bagi Orang Tua (Parental Benefit)	253
Tunjangan Cuti Sakit (Sick Leave Benefit)	253
Tunjangan bagi Pengangguran (Unemployment Benefit)	254
Pensiun (Pension)	254
Perawatan bagi Orang Tua Lanjut Usia (Elderly Care)	254
Jerman	255
Pajak Penghasilan di Jerman	255
Kontribusi Sosial di Jerman	255
Inggris	256
Indonesia	257
Jaminan Pelayanan Kesehatan dan Standar Tarif	258
Soal Esai	258
Soal Pilihan Ganda	259
Studi Kasus	261



Bab 8 Investasi Dana Hasil Kontribusi Kas dan Efisiensi 263

Realitas	265
Teori Investasi Dana Hasil Kontribusi Kas dan Efisiensi	267
Pengertian Investasi Dana Hasil Kontribusi Kas dan Efisiensi	267
Arti Penting Investasi Dana Hasil Kontribusi Kas dan Efisiensi	267
Bentuk Investasi Dana Hasil Kontribusi Kas dan Efisiensi	268
Karakteristik Investasi Dana Hasil Kontribusi Kas dan Efisiensi	270

Proses Investasi Dana Hasil Kontribusi Kas dan Efisiensi	271
Return dan Risiko	271
Pengertian Return	271
Pengertian Risiko	272
Hubungan Expected Return dengan Risiko	273
Beta	273
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Beta	274
Sistem Investasi Dana Hasil Kontribusi Kas dan Efisiensi	276
Investasi Sektor Riil	276
Pengertian Investasi Sektor Riil	276
Arti Penting Investasi Sektor Riil	276
Bentuk Investasi Sektor Riil	276
Investasi Properti (Tanah)	276
Investasi Emas	278
Hambatan Investasi Sektor Riil	279
Perbedaan Investasi Riil dan Investasi Nonriil	280
Investasi Sektor Keuangan	280
Pengertian Investasi Sektor Keuangan	280
Arti Penting Investasi Sektor Keuangan	280
Bentuk Investasi Sektor Keuangan	281
Saham	281
Obligasi	281
Produk Derivatif	282
Reksadana	283
Sumber Dana Investasi Sektor Keuangan	283
Siklus Investasi Dana Hasil Kontribusi Kas dan Efisiensi	284
Proses Investasi Sektor Riil	284
Teori Real Business Cycle	285
Proses Investasi Sektor Keuangan	286
Slowdown: Cash is King	287
Recession: Memilih antara Obligasi dan Saham	287
Recovery: Perbaikan pada Saham	288
Expansion: Melanjutkan Pilihan pada Saham	288
Teknik Perhitungan Kelayakan Investasi	290
Cost Benefit Analysis	290
Contoh Perhitungan Analisis Biaya Manfaat	291
1. Payback Period (PP)	292
2. Return on Investment (ROI)	292
3. Net Present Value (NPV)	293

271	4. Internal Rate of Return (IRR)	293
271	Cost Effectiveness Analysis	294
271	Cermat Perhitungan Kelayakan Investasi	294
272	Net Present Value (NPV)	295
273	Benefit Cost Ratio (BCR)	296
273	Internal Rate of Return (IRR)	296
274	Kondisi Lalu Lintas Jalan Eksisting Tahun 2013	297
276	Kondisi Lalu Lintas Jalan Eksisting dengan Adanya Jalan Tol	298
276	Penghematan Biaya Pemakai Jalan Menggunakan Tol	298
276	Analisis Finansial	299
276	Kesimpulan	300
276	Soal Esai	300
276	Soal Pilihan Ganda	301
278	Studi Kasus	303
279		
280	Bab 9 Kerangka Penyelenggaraan Jaminan dengan Kontribusi Kas dan Tanpa	
280	Kontribusi Kas 305	
280	Realitas	307
280	Teori Penyelenggaraan Jaminan dengan Kontribusi Kas dan tanpa Kontribusi Kas	309
281	Pengertian Penyelenggaraan Jaminan dengan Kontribusi Kas	309
281	Pengertian Penyelenggaraan Jaminan tanpa Kontribusi Kas	309
281	Tujuan Penyelenggaraan Jaminan dengan Kontribusi Kas dan tanpa Kontribusi Kas	310
282	Jenis Program Penyelenggaraan Jaminan dengan Kontribusi Kas dan tanpa Kontribusi	
283	Kas	310
283	Jaminan Kesehatan	311
284	Contoh Negara dengan Jaminan Kesehatan	311
284	Jaminan Pendidikan	313
285	Jaminan Pensiun	314
286	Sistem Penyelenggaraan Jaminan dengan Kontribusi Kas dan tanpa Kontribusi Kas	314
287	Mekanisme Penyelenggaraan Jaminan yang Dikelola Pemerintah	314
287	Mekanisme Penyelenggaraan Jaminan yang Dikelola Swasta	315
288	Mekanisme Penyelenggaraan Jaminan yang Dikelola Pemerintah dan Swasta	316
288	Siklus Penyelenggaraan Jaminan dengan Kontribusi Kas dan tanpa Kontribusi Kas	316
290	Persiapan	316
290	Memperkirakan Biaya Intervensi Prioritas	316
291	Mengidentifikasi Ketersediaan Sumber Daya	316
292	Pertumbuhan	317
292	Menentukan Kesenjangan Pembiayaan	317
293	Memberikan Advokasi atas Sumber Daya	317

Pelaksanaan/Pelebagaan	317
Mobilisasi Dana	317
Pembiayaan Program dan Intervensi	317
Asuransi	318
Pengawasan terhadap Pencairan dan Pengeluaran Dana	318
Teknik Pengembangan Sistem Jaminan dengan Kontribusi Kas dan tanpa Kontribusi Kas	318
Teknik Pengukuran dengan Kontribusi Kas dan tanpa Kontribusi Kas	318
Langkah-Langkah Perhitungan Premi	319
Dasar Asumsi Perhitungan Premi	319
Teknik Pengumpulan dengan Kontribusi Kas dan tanpa Kontribusi Kas	320
Teknik Pengajuan Klaim Jaminan	321
Klaim	321
Penyebab Klaim	322
Prosedur Klaim	325
Syarat Pengajuan Klaim	325
Teknik Pembayaran Klaim Jaminan	325
Survei Klaim	325
Penyelesaian Klaim	326
Pembayaran Klaim	326
Contoh Penyelenggaraan Jaminan dengan Kontribusi Kas dan tanpa Kontribusi Kas	326
Jaminan Sosial di Jepang	326
Asuransi Kesehatan (Health Insurance atau Kenko Hoken)	326
Asuransi Pensiun (Pension System atau Nenkin)	329
Asuransi Pengangguran (Unemployment Insurance atau Koyo Hoken)	330
Asuransi Kecelakaan Tenaga Kerja (Labor Accident Insurance atau Rosai)	331
Asuransi Perawatan Jangka Panjang (Long-Term-Care Insurance atau Kaigo Hoken)	331
Bentuk Perlindungan "Seikatsu Hogo"	331
Jaminan Memperoleh Pendidikan	334
Jaminan Sosial di Tiongkok	335
Program Jaminan Sosial dengan Dukungan Keuangan Negara	335
Reformasi Program Jaminan Sosial bagi Pengangguran	336
Reformasi Program Asuransi bagi Tenaga Medis	337
Reformasi Program Asuransi Kecelakaan Kerja	337
Reformasi Program Asuransi Persalinan	337
Tunjangan Perumahan	338
Soal Esai	338
Soal Pilihan Ganda	338
Studi Kasus	340

JAMINAN TANPA KONTRIBUSI KAS

Bab 10 Kreasi Penciptaan Lapangan Kerja dan Daur Ulang Pelatihan	343
Hasil	345
Tujuan Kreasi Penciptaan Lapangan Kerja dan Daur Ulang Pelatihan	347
Pengertian Penciptaan Lapangan Kerja dan Daur Ulang Pelatihan	347
Tujuan Penciptaan Lapangan Kerja dan Daur Ulang Pelatihan	348
Manfaat Penciptaan Lapangan Kerja dan Daur Ulang Pelatihan	348
Sistem Kreasi Penciptaan Lapangan Kerja dan Daur Ulang Pelatihan	349
Penciptaan Lapangan Kerja oleh Pemerintah	349
Bentuk-Bentuk Penciptaan Lapangan Kerja oleh Pemerintah	350
Penciptaan Lapangan Kerja oleh Swasta	352
Penciptaan Lapangan Kerja oleh Pemerintah dan Swasta	353
Pengertian Penciptaan Lapangan Kerja oleh P3	353
Silabus Kreasi Penciptaan Lapangan Kerja dan Daur Ulang Pelatihan	355
Peningkatan Iklim Investasi	356
Perbaikan Daya Saing	357
Penciptaan Fleksibilitas Tenaga Kerja	358
Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	359
Pembangunan Skema Jaminan untuk Memperoleh Pekerjaan bagi Masyarakat Miskin	360
Peninjauan Kembali Prioritas Pengeluaran Pemerintah	360
Teknik Kreasi Penciptaan Lapangan Kerja dan Daur Ulang Pelatihan	361
Identifikasi Peluang Kerja Masyarakat sebagai Kontribusi tanpa Kas	361
Pekerjaan Ulang Infrastruktur	361
Prinsip Kontrak Pelayanan, Operasional, dan Pemeliharaan (Operation, Maintenance, and Service Contract)	363
Prinsip BOT (Build, Operate, and Transfer)	363
Prinsip Konsesi	364
Prinsip Joint Venture	365
Prinsip Community-Based Provision (CBP)	365
Pengembangan dan Pabrikasi Produk Baru	368
Pelatihan untuk Mengisi Kebutuhan	370
Contoh Kreasi Penciptaan Lapangan Kerja dan Daur Ulang Pelatihan	372
Soal Esai	380
Soal Pilihan Ganda	381
Studi Kasus	382
Glosarium G-1	
Daftar Pustaka D-1	
Indeks I-1	